



## **SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI HAKIKAT SANKSI TINDAKAN DALAM *DOUBLE TRACK SYSTEM***

### **INTISARI**

**Oleh : Naufal Afina Zulfah<sup>1</sup>, Niken Subketi Budi Utami<sup>2</sup>**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sanksi antara sanksi kebiri kimia dengan sanksi tindakan pada konsep *double track system* serta untuk menganalisis kesesuaian sanksi kebiri kimia dengan konsep sanksi tindakan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini berupa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum teoritis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa kebiri kimia merupakan sanksi tindakan yang kurang sesuai dengan ide dasar *double track system*. Sanksi kebiri kimia hanya menasar pada fisik pelaku dan hanya bisa bermanfaat bagi pelaku yang memiliki tingkat libido abnormal, sedangkan pelaku kekerasan seksual mayoritas bukan bermasalah pada libido, tetapi karena gangguan kesehatan mental yakni penyimpangan seksual. Kebiri kimia sebagai sanksi tindakan tidak dapat memberikan perawatan terhadap mental pelaku yang sakit, tidak dapat mendidik pelaku agar siap untuk kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Kebiri kimia juga tidak dapat memenuhi tujuan sanksi tindakan dalam *double track system* untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sanksi kebiri kimia tidak sesuai dengan konsep sanksi tindakan dalam RKUHP, karena kebiri kimia mengabaikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia pelaku. Kebiri kimia merupakan sanksi yang merendahkan martabat pelaku.

Kata Kunci: Kebiri kimia, *double track system*, sanksi tindakan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata-1 (S1) pada Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

## **SANCTION OF CHEMICAL CASTRATION REVIEWED FROM ACT OF SANCTION ESSENCES IN DOUBLE TRACK SYSTEM**

### **ABSTRACT**

**By : Naufal Afina Zulfah<sup>3</sup>, Niken Subekti Budi Utami<sup>4</sup>**

This law study aims to analyze suitability of witnesses among chemical castration of evidence and act witnesses on double track system concept, and to analyze suitability of chemical castration sanction to sanction concept of draft criminal law (RKUHP).

The research in this study was normative law observation or theoretical law observation. Normative observation had done by law study which has been concepted as applicable norm or rule on society and it didn't study of law implementation.

Based on the result, the conclusion of this study was chemical castration is not suitable act of sanction according to double track system basic idea. Chemical castration of sanction was targeted on physical suspect, and it only worth for suspect who had abnormal libido level, whereas majority of perpetrators of sexual violence didn't have problem from their libido, but it because interference of mental health which are called sexual deviations. Chemical castration could not classified as act of sanction because it could not educate the suspect for take back to community society as whole human being. Chemical castration could not fulfil act of sanction's objective on double track system to protect society. Chemical castration sanction did not convenient to sanction concept of draft criminal law (RKUHP) concept. It because this sanction ignored human right protection for the suspects, and it could humiliate suspect dignity.

Key words : Chemical castration, double track system, act of sanction

---

<sup>3</sup> Undergraduate Student of Criminal Law Departement in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Lecturer of Criminal Law in Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.